

**ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA  
PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS  
PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat  
Untuk memenuhi gelar sarjana ekonomi (S.E)  
Program studi Ekonomi Pembangunan*



**Oleh:**

**Nama : NURUL FADHILAH**  
**NPM : 1405180057**  
**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : NURUL FADHILAH  
N P M : 1405180057  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Dr. PRAWIDYA HARIANI R.S, S.E., M.Si

Penguji II

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Pembimbing

Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

**PANITIA UJIAN**

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris



ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NURUL FADHILAH  
N.P.M : 1405180057  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM  
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM  
MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN  
MASYARAKAT INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing Skripsi

  
Dra. Hj. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
H. JANURI, SE, MM, M.Si



## ABSTRAK

### **NURUL FADHILAH. NPM 1405180057. ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA.**

Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa akan dapat terwujud secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, maka pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah manusia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan kebijakan program KIP untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia serta untuk mengevaluasi kebijakan program tersebut selama kepemimpinan Jokowi JK. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis deskriptif terhadap kebijakan program yang dibuat oleh pemerintah. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah pada masa kepemimpinan Jokowi-JK selama 2 tahun berjalan maka realisasi program Kartu Indonesia Pintar sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang dimana ini terwujud dalam meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi Indonesia, yang membuktikan adanya peningkatan dalam kualitas sumber daya manusianya. Selain itu juga, realisasi program Kartu Indonesia Pintar juga terlihat jelas dari trend kemiskinan di Indonesia yang semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Menurunnya tingkat kemiskinan itu dikarenakan adanya perbaikan dari sumber daya manusianya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan keluar dari garis kemiskinan. Selain itu juga, realisasi program Kartu Indonesia pintar dapat dilihat dari angka anak-anak putus sekolah yang kian lama kian menurun hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Program Kartu Indonesia Pintar yang dicanangkan oleh Jokowi-Jk sudah terealisasi dengan baik walaupun belum terealisasi secara merata.

**Kata kunci:** *Kartu Indonesia Pintar, Sumber Daya Manusia, Kualitas Pendidikan*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: **“Analisis Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indonesia”**, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Orang tua yang saya sayangi dan seluruh keluarga yang telah memberi dukungan dan semangatnya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan/arahan/masukan serta kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini..
5. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh dosen mata kuliah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Staf Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada sahabat-sahabat saya perempuan tangguh (Windya, Kiki , Ipik, dan Bebe) yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada saya.
9. Kepada teman-teman dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 dan serta teman-teman EP lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

Nurul Fadhilah

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI .....i-ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR.....iv

DAFTAR GRAFIK.....v

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 18

1.3 Batasan Masalah..... 19

1.4 Rumusan Masalah..... 19

1.5 Tujuan Penelitian..... 20

1.6 Manfaat Penelitian..... 20

### BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis.....

21

2.1.1 Teori Pembangunan

.....

21

2.1.2 Teori Pengeluaran pemerintah

.....

25

2.1.3 Teori Kemiskinan

.....

34

2.1.4 Teori Indeks Pembangunan Manusia	
.....	
35	
2.2 Peneliti Terdahulu	
.....	
44	
2.3 Defenisi Operasional	
.....	
44	
2.4 Kerangka Konseptual	
.....	
44	

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian	
.....	
44	
3.2 Defenisi Operasional	
.....	
44	
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	
.....	
45	
3.4 Jenis dan Sumber Data	
.....	
45	
3.5 Teknik Pengumpulan Data	
.....	
46	
3.6 Tahapan Analisis	
.....	
46	
3.6.1 Teknik Pengolahan Data	
.....	
46	

3.6.2 Teknik Analisa Data

.....

46

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Tentang Indonesia.....

48

4.1.1 Letak Geografis

.....

48

4.2 Analisis Deskriptif Data.....

50

4.2.1 Perkembangan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

.....

50

4.2.2 Perkembangan Kualitas Pendidikan di Indonesia

.....

56

4.2.3 Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar

.....

66

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....

67

5.2 Saran.....

68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	9
Tabel 1.2.....	10
Tabel 1.3.....	17
Tabel 2.1.....	41
Tabel 2.2.....	42
Tabel 3.1.....	45
Tabel 4.1.....	55
Tabel 4.2.....	59
Tabel 4.3.....	60

Tabel 4.4.....  
65

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2-1.....  
28  
Gambar 2-2.....  
30  
Gambar 2-3.....  
31  
Gambar 2-4.....  
39

Gambar 2-5.....	
43	
Gambar 2-6.....	
43	
Gambar 4-1.....	
52	

## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1-1.....	
6	
Grafik 1-2.....	
12	
Grafik 4-1.....	
62	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan serangkaian usaha untuk mencapai kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa akan dapat terwujud secara nyata dengan usaha menciptakan ketahanan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa. Oleh karena itu, maka pendidikan akan diarahkan kepada perwujudan keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara pengembangan kuantitas dan pengembangan kualitas serta aspek lahiriah dan aspek rohaniah manusia. Itulah sebabnya pendidikan nasional dirumuskan sebagai usaha sadar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan kehidupan bangsa menjadi lebih baik.

Dalam era SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dimulai saat negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia menyepakati outcome Document SDGs pada tanggal 2 Agustus 2015. Periode SDGs Tahun 2016-2030 merupakan program yang kegiatannya meneruskan agenda-agenda sekaligus menindaklanjuti program yang belum selesai. Menjadi bahan sorotan tertinggi adalah sektor kesehatan yaitu sebaran balita kurang gizi di Indonesia, proporsi balita pendek, status gizi anak, tingkat kematian ibu, pola konsumsi pangan pokok dan sebagainya.

Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Sejak tahun 2000, telah ada kemajuan besar dalam pencapaian target pendidikan dasar universal. Angka partisipasi total dalam daerah berkembang mencapai 91 persen pada tahun 2015, dan jumlah seluruh dunia dari anak-anak keluar dari sekolah telah menurun hampir setengah. Ada juga telah terjadi peningkatan dramatis dalam tingkat melek huruf, dan lebih banyak anak perempuan di sekolah daripada sebelumnya. Ini semua adalah keberhasilan yang luar biasa. Kemajuan juga menghadapi tantangan berat di daerah berkembang karena tingkat kemiskinan yang tinggi, konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Di Asia Barat dan Afrika Utara, konflik bersenjata berlangsung telah melihat peningkatan proporsi anak-anak keluar dari sekolah. Ini adalah tren yang mengkhawatirkan.

Sementara Afrika membuat kemajuan terbesar dalam pendaftaran sekolah dasar di antara semua daerah berkembang – dari 52 persen pada tahun 1990, hingga 78 persen pada 2012 – kesenjangan besar masih tetap. Anak-anak dari rumah tangga termiskin empat kali lebih mungkin untuk keluar dari sekolah dibandingkan rumah tangga kaya. Kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan juga tetap tinggi. Mencapai pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua menegaskan kembali keyakinan bahwa pendidikan merupakan salah satu kendaraan yang paling kuat dan terbukti untuk pembangunan berkelanjutan. Gol ini memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan sekolah dasar dan menengah gratis pada 2030. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses yang sama terhadap pelatihan kejuruan yang terjangkau, dan untuk menghilangkan gender dan kekayaan kesenjangan dengan tujuan untuk

mencapai akses universal untuk pendidikan yang berkualitas tinggi. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu dari 17 Sasaran Global yang membentuk 2.030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan. Pendekatan terpadu sangat penting untuk kemajuan seluruh beberapa tujuan.

Memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah dasar untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Kemajuan besar telah dibuat terhadap peningkatan akses pendidikan di semua tingkatan dan meningkatkan angka partisipasi di sekolah terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Keterampilan keaksaraan dasar telah meningkat pesat, namun upaya lebih berani dibutuhkan untuk membuat langkah yang lebih besar untuk mencapai tujuan pendidikan universal. Misalnya, dunia telah mencapai kesetaraan dalam pendidikan dasar antara anak perempuan dan anak laki-laki, namun beberapa negara telah mencapai target yang di semua tingkat pendidikan. Adapun target indikator pendidikan dalam SDG's adalah :

1. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki lengkap gratis, adil dan kualitas primer dan pendidikan menengah yang mengarah ke hasil belajar yang efektif yang relevan dan Goal-4 pada.
2. Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, peduli dan pra utama pendidikan sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar.

3. Tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki untuk pendidikan yang terjangkau dan kualitas teknis, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk perguruan tinggi.
4. Tahun 2030, secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
5. Tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan untuk rentan, termasuk penyandang cacat, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan.
6. Tahun 2030, memastikan bahwa semua pemuda dan sebagian besar orang dewasa, baik laki-laki dan perempuan, mencapai membaca dan menghitung.
7. Tahun 2030, memastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non-kekerasan, kewarganegaraan global dan apresiasi keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya untuk Membangun pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang anak, penyandang cacat dan sensitif gender dan memberikan aman, tanpa kekerasan, inklusif dan efektif lingkungan belajar untuk semua.

8. Tahun 2020, secara substansial memperluas secara global jumlah beasiswa yang tersedia untuk negara-negara berkembang, di negara-negara berkembang khususnya, pulau kecil yang sedang berkembang dan negara-negara Afrika, untuk pendaftaran di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan dan informasi dan teknologi komunikasi, teknis, teknik dan program ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
9. Tahun 2030, secara substansial meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional untuk pelatihan guru di negara-negara berkembang, terutama terbelakang negara dan pulau berkembang kecil negara.

Begitu pentingnya pendidikan dalam memajukan suatu bangsa, namun dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bukan merupakan hal yang mudah, terdapat berbagai permasalahan yang mampu menghambat pendidikan. Keadaan pendidikan di Indonesia yang masih memprihatinkan, mulai dari mutu pendidikan yang masih rendah yang dibuktikan oleh banyaknya guru yang mengajar bukan pada bidangnya serta tingkat kejujuran peserta didik yang masih rendah, kemudian fasilitas untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang kurang memadai, hingga pemerataan pendidikan yang didasari oleh alasan ekonomi. Banyak anak yang tak dapat mengenyam pendidikan karena biaya yang sangat tinggi. Kemiskinan masih menjadi salah satu alasan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Hingga saat ini disparitas angka partisipasi sekolah sangat tinggi. Angka partisipasi pendidikan keluarga yang mampu secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi pendidikan keluarga yang ekonominya kurang mampu. Salah satu alasannya adalah

tingginya biaya pendidikan baik biayalangsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biayalangsung yang ditanggung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku,seragam dan alat tulis, sedangkan biaya tidak langsung yang ditanggung olehpeserta didik antara lain biaya transportasi, uang saku, kursus dan biaya lain.

**Grafik 1-1**

**Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia, 1999-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat dari tahun 2010-2017, persentase penduduk miskin di Indonesiamengalami penurunan. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 13,38%, dan sampai September 2016 persentase penduduk miskin di Indonesiaberkisar di angka 10,70%. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin di Indonesiamenurun sebanyak 0,06% dari tahun 2016 yaitu sebesar 10,64%. Walaupun tren tingkat penduduk miskin di Indonesia hingga tahun 2017 selalu mengalami penurunan, namun angka penduduk miskin di Indonesia masih terbilang tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat

untuk menempuh pendidikan di Indonesia mengingat biaya pendidikan yang tinggi.

Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2015 penduduk miskin Indonesia berjumlah 28.513.57 ribu jiwa dan tahun 2016 berjumlah 28.005.41 sedangkan di provinsi Lampung jumlah penduduk miskin 2015 berjumlah 1.100.68 ribu jiwa naik menjadi 1.169.60 ribu jiwa. Namun bagaimanapun juga, pendidikan tetap harus dinomorsatukan, sebab jika tak ada ilmu tidak akan kita dapati perbaikan kemiskinan.

Dapat di lihat dari table berikut ini bahwa banyak terdapat anak – anak yang putus sekolah untuk tingkat SD berdasarkan urutan ranking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Papua sebesar 5,32% urutan ranking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 1,54% urutan ranking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,53% urutan ranking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,16% urutan ranking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,04% . Sedangkan untuk ranking terendah pertama terdapat di Provinsi Aceh sebesar 0,04% urutan ranking terendah kedua terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,06% urutan ranking yang terendah ketiga terdapat di Provinsi Bali sebesar 0,09% urutan ranking yang terendah keempat terdapat di Provinsi Banten sebesar 0,12% urutan ranking yang terendah keempat terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,15% Sedangkan untuk tingkat SMP banyak anak – anak yang putus sekolah berdasarkan urutan ranking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi

Papua sebesar 4,95% urutan rangking tertinggi yang kedua terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 4,41% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 4,18% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,77% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 3,22% . Sedangkan untuk urutan rangking terendah yang pertama terdapat di Provinsi Bali sebesar 0,40% urutan rangking terendah kedua terdapat di Provinsi Maluku sebesar 0,70% urutan rangking terendah ketiga terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,93% urutan rangking terendah keempat terdapat di Provinsi Dki Jakarta sebesar 0,97% urutan rangking terendah kelima terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,05% . Dan untuk tingkat SMA banyak anak – anak yang putus sekolah berdasarkan urutan rangking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,05% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 5,66% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,53% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Lampung 4,71% , Dan untuk urutan rangking yang terendah pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,69% urutan rangking yang terendah kedua terdapat di Provinsi Bali sebesar 1,20% urutan rangking terendah yang ketiga terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,23% urutan rangking terendah yang keempat terdapat di Provinsi Banten sebesar 1,35% urutan rangking terendah yang kelima terdapat di Provinsi Maluku sebesar 1,40% .

**Tabel 1-1**  
**Angka Putus Sekolah Berdasarkan Level Dan Provinsi Seindonesia Tahun**  
**2017 (Persen)**

Provinsi	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,04	1,35	1,71
Sumatera Utara	0,14	1,59	2,76
Sumatera Barat	0,42	1,87	2,77
Riau	0,50	1,53	2,07
Jambi	0,42	1,52	3,22
Sumatera Selatan	0,24	1,96	2,85
Bengkulu	0,37	1,21	2,68
Lampung	0,39	1,37	4,71
Kep. Bangka Belitung	0,42	2,29	2,60
Kepulauan Riau	0,37	1,28	2,26
DKI Jakarta	0,29	0,97	1,76
Jawa Barat	0,34	1,83	2,51
Jawa Tengah	0,06	1,85	4,78
DI Yogyakarta	0,15	0,93	0,69
Jawa Timur	0,76	1,30	4,34
Banten	0,12	1,22	1,35
Bali	0,09	0,40	1,20
Nusa Tenggara Barat	1,01	1,05	4,79
Nusa Tenggara Timur	1,04	3,77	4,57
Kalimantan Barat	1,16	3,14	4,25
Kalimantan Tengah	0,79	2,40	4,14
Kalimantan Selatan	0,65	2,93	4,68
Kalimantan Timur	0,18	1,15	1,23
Kalimantan Utara	0,53	2,86	6,05
Sulawesi Utara	0,43	1,71	5,20
Sulawesi Tengah	1,15	1,61	3,11
Sulawesi Selatan	1,53	2,09	4,63
Sulawesi Tenggara	0,66	2,00	5,53
Gorontalo	1,54	4,18	5,66
Sulawesi Barat	1,04	4,41	4,19
Maluku	0,31	0,70	1,40
Maluku Utara	0,20	1,32	4,18
Papua Barat	0,49	3,22	1,71
Papua	5,32	4,95	4,23
<b>Indonesia</b>	<b>0,53</b>	<b>1,76</b>	<b>3,35</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Tabel 1-2

**Angka Tidak Sekolah Menurut Golongan Usia Dan Provinsi SeIndonesia  
Di Indonesia Tahun 2017 (Persen)**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,15	1,91	17,85
Sumatera Utara	0,51	3,40	23,24
Sumatera Barat	0,50	3,71	17,14
Riau	1,02	5,27	23,48
Jambi	0,41	4,11	28,46
Sumatera Selatan	0,37	5,99	30,95
Bengkulu	0,20	2,80	20,93
Lampung	0,22	5,24	29,97
Kep. Bangka Belitung	0,36	7,59	33,01
Kepulauan Riau	0,68	0,92	17,20
DKI Jakarta	0,33	2,36	28,50
Jawa Barat	0,49	6,23	33,38
Jawa Tengah	0,38	4,52	31,52
DI Yogyakarta	0,13	0,37	12,39
Jawa Timur	0,43	3,23	28,49
Banten	0,69	4,33	32,23
Bali	0,56	2,28	17,84
Nusa Tenggara Barat	0,57	2,31	23,39
Nusa Tenggara Timur	1,73	5,24	25,35
Kalimantan Barat	1,56	7,49	32,47
Kalimantan Tengah	0,50	6,63	33,38
Kalimantan Selatan	0,45	7,67	31,70
Kalimantan Timur	0,33	1,21	18,68
Kalimantan Utara	1,66	3,96	24,88
Sulawesi Utara	0,63	5,09	26,96
Sulawesi Tengah	1,85	7,59	25,13
Sulawesi Selatan	0,84	6,91	29,40
Sulawesi Tenggara	0,68	5,92	27,06
Gorontalo	1,24	8,77	30,14
Sulawesi Barat	1,90	10,12	31,97
Maluku	0,28	3,14	20,92
Maluku Utara	0,81	2,76	23,94
Papua Barat	2,73	3,08	19,40
Papua	18,20	20,91	36,65
<b>Indonesia</b>	<b>0,86</b>	<b>4,92</b>	<b>28,58</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

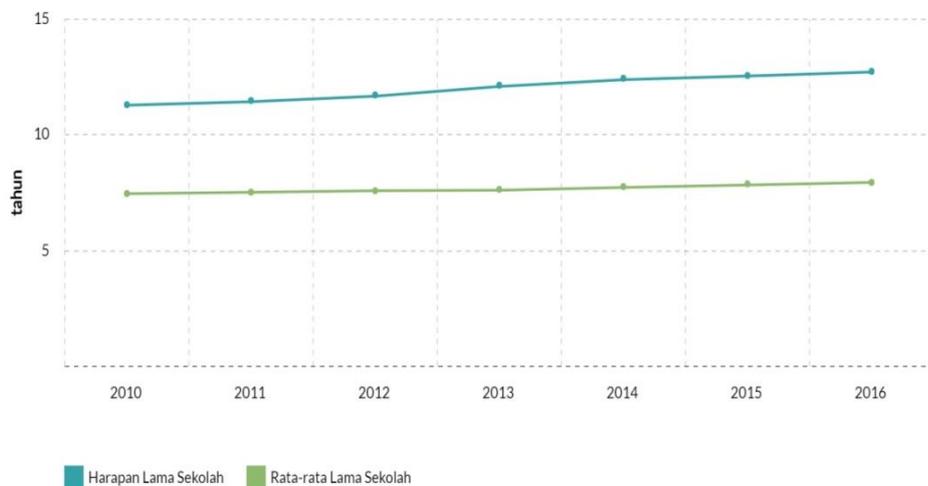
Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa anak perempuan yang tidak bersekolah berdasarkan kelompok umur 7 – 12 tahun (tingkat SD) urutan rangking tertinggi yang pertama banyak terdapat di Provinsi Papuan sebesar 18,20% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 2,73% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,90% urutan

rangking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,85% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,73% yang dimana lebih banyak anak perempuan yang tidak bersekolah pada tingkat SD di Papua dibandingkan anak laki – lakinya,dan urutan rangking terendah pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,13% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Aceh sebesar 0,15% urutan rangking terendah ketiga terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 0,20% urutan rangking terendah keempat terdapat di Provinsi Lampung sebesar 0,22% urutan rangking terendah kelima terdapat di Provinsi Maluku sebesar 0,28%,dan kelompok umur 13 – 15 tahun (tingkat SMP ) berdasarkan urutan rangking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Papua sebesar 20,91% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 10,12% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 8,77% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,59% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,49%,dan urutan rangking terendah yang pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,37% urutan rangking terendah kedua terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,92% urutan rangking terendah ketiga terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,21% urutan rangking terenda h keempat terdapat di Provinsi Aceh sebesar 1,91% urutan rangking terendah kelima terdapat di Provinsi Bali sebesar 2,28%, untuk kelompok usia 16 – 18 tahu (tingkat SMA ) banyak anak tidak sekolah berdasarkan urutan rangking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Papua sebesar 36,65% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 33,38% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di

Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 33,38% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 31,97% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 31,52%, dan urutan rangking terendah yang pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 12,39% urutan rangking terendah kedua terdapat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 17,14% urutan rangking terendah ketiga terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 17,20% urutan rangking terendah keempat terdapat di Provinsi Bali sebesar 17,84% urutan rangking terendah kelima terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 18,68%.

**Grafik 1-2**

**Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia tahun 2010-2016**



Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah
2010	11,29	7,46
2011	11,44	7,52
2012	11,68	7,59
2013	12,1	7,61
2014	12,39	7,73
2015	12,55	7,84
2016	12,72	7,95

Sumber : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik merilis Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia periode 2010 hingga 2016. Dalam periode tersebut, Harapan Lama Sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1,43 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,49 tahun.

Selama periode 2010-2016, Harapan Lama Sekolah rata-rata tumbuh 2,12 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang sekolah. Tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Indonesia mencapai 12,72 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,09 persen per tahun selama periode 2010-2016. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 2016, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas pendidikannya telah mencapai 7,95 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Dalam UUD 1945 pasal 31 disebutkan :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. \*\*\*\*\*)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. \*\*\*\*\*)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang – undang. \*\*\*\*\*)

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. \*\*\*\*\*)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. \*\*\*\*\*)

Untuk mengimplementasikan pasal 31 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak. Maka dari itu pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2017 total anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp416,09 T atau sebesar 20,59% dari total APBN dengan rincian 26,6% (Rp28,73 T) diberikan untuk program kerja kemenristek dikti, 34,7% (Rp50,44 T) diberikan untuk program kerja kementerian agama, sedangkan 27,4% (Rp39,82 T) diberikan untuk program kerja kemendikbud. (Kemenkeu, 2017)

Anggaran pendidikan pada tahun 2017 tetap dijaga 20% dari APBN, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Pada tahun 2014 anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan adalah sekitar Rp370 T, tahun 2015 sekitar Rp410 T, tahun 2016 sebesar Rp416,6 T, dan pada tahun 2017 sebesar Rp416,1 T (Kemenkeu, 2016).

Selain dengan peningkatan postur anggaran pendidikan, pemerintah juga melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi

masyarakat miskin. Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah melalui PIP adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu bantuan yang diberikan pemerintah berupa bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan bidik misi, rehabilitasi sekolah, dan tunjangan profesi bagi guru.

Untuk Penerima Kartu Indonesia Pintar per tahun 2017 terhitung sebanyak 19,7 juta siswa dimana untuk SD sebesar Rp450 ribu/siswa/tahun, SMP sebesar Rp750 ribu/siswa/tahun, dan untuk SMA/SMK sebesar Rp1 juta/siswa/tahun. Dan Penerima bidik misi sebanyak 362,7 ribu mahasiswa. (Kemenkeu, 2017)

Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 8,5 juta siswa (Pusat) dimana untuk MI sebesar Rp800 ribu/siswa/tahun dan untuk MTs Rp1 juta/siswa/tahun. Dan sebanyak 46,2 juta siswa (daerah) dimana untuk SD/SDLB sebesar Rp800 ribu/siswa/tahun, SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp1 juta/siswa/tahun, dan SMA/SMK sebesar 1,4 juta/siswa/tahun.

Untuk Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 54.739 ruang (Pusat) dan 27.140 ruang (Daerah). Dan untuk Tunjangan Profesi, sebanyak 1,3 juta guru untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, 41,6 ribu guru untuk Tunjangan Khusus Guru PNSD Daerah Khusus, dan 102,7 ribu dosen untuk Tunjangan Sertifikat Dosen.

Adanya Program Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu membantu masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu akan berjalan baik apabila ada dukungan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang

telah diberikan pemerintah. Begitu juga dengan dikeluarkannya KIP, sikap masyarakat merupakan faktor yang penting agar dapat terlaksana peningkatan pendidikan pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada tiga macam sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan yakni mendukung, netral dan menolak, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu warga kampung Lebak Manis Kelurahan Sukajawa Baru, kebanyakan masyarakat bersikap kurang mendukung Program Indonesia Pintar karena kebanyakan masyarakat menggunakan KIP tidak sebagaimana mestinya, dengan menggunakan KIP bukan untuk membiayai keberlangsungan pendidikan anak, melainkan menggunakannya untuk kepentingan lain seperti untuk membayar cicilan motor, membayar iuran listrik dan sebagainya. Apa yang menjadi tujuan Program Indonesia Pintar, dan apa yang diinginkan pemerintah terhadap pemanfaatan KIP belum termanifestasikan di masyarakat, seharusnya pemanfaatan dana KIP adalah untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian atau seragam dan perlengkapan sekolah, pembayaran transportasi ke madrasah atau sekolah dan keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah atau sekolah seperti biaya untuk membeli media pembelajaran LKS, biaya yang dikeluarkan saat pembelajaran praktik misalnya saat pembelajaran portofolio dan sebagainya.

Dengan adanya KIP maka pemerintah mengharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 1-3

Tabel Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010 - 2016

Provinsi / Kabupaten / Kota	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ACEH	67.09	67.45	67.81	68.3	68.81	69.45	70
SUMATERA UTARA	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51	70
SUMATERA BARAT	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98	70.73
RIAU	68.65	68.9	69.15	69.91	70.33	70.84	71.2
JAMBI	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89	69.62
SUMATERA SELATAN	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46	68.24
BENGKULU	65.35	65.96	66.61	67.5	68.06	68.59	69.33
LAMPUNG	63.71	64.2	64.87	65.73	66.42	66.95	67.65
KEP. BANGKA BELITUNG	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05	69.55
KEP. RIAU	71.13	71.61	72.36	73.02	73.4	73.75	73.99
DKI JAKARTA	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99	79.6
JAWA BARAT	66.15	66.67	67.32	68.25	68.8	69.5	70.05
JAWA TENGAH	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49	69.98
DI YOGYAKARTA	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59	78.38
JAWA TIMUR	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95	69.74
BANTEN	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27	70.96
BALI	70.1	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27	73.65
NUSA TENGGARA BARAT	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19	65.81
NUSA TENGGARA TIMUR	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67	63.13
KALIMANTAN BARAT	61.97	62.35	63.41	64.3	64.89	65.59	65.88
KALIMANTAN TENGAH	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53	69.13
KALIMANTAN SELATAN	65.2	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38	69.05
KALIMANTAN TIMUR	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17	74.59
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	67.99	68.64	68.76	69.2
SULAWESI UTARA	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39	71.05
SULAWESI TENGAH	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76	67.47
SULAWESI SELATAN	66	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15	69.76
SULAWESI TENGGARA	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75	69.31

<b>GORONTALO</b>	62.65	63.48	64.16	64.7	65.17	65.86	66.29
<b>SULAWESI BARAT</b>	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96	63.6
<b>MALUKU</b>	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05	67.6
<b>MALUKU UTARA</b>	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91	66.63
<b>PAPUA BARAT</b>	59.6	59.9	60.3	60.91	61.28	61.73	62.21
<b>PAPUA</b>	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05
<b>INDONESIA</b>	66.53	67.09	67.7	68.31	68.9	69.55	70.18

Berdasar table Indeks Pembangunan Manusia diatas dapat dilihat bahwa IDM masyarakat Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebesar 66,53%, tahun 2011 sebesar 67,09%, tahun 2012 sebesar 67,7%, tahun 2013 sebesar 68,31%, tahun 2014 sebesar 68,9%, tahun 2015 sebesar 69,55, dan tahun 2016 sebesar 70,18%.

Berdasarkan data dan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting mengingat banyaknya anak yang membutuhkan bantuan guna menempuh pendidikan, tetapi justru bantuan tersebut disalahgunakan. Bagaimana suatu daerah akan maju bila sumber daya manusianya tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik.

Maka berdasarkan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indonesia**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang diutarakan, dapat didefinisikan berbagai masalah yaitu sebagai berikut:

1. Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor penghambat anak untuk menempuh pendidikan di Indonesia karena tingginya biaya pendidikan.
2. Masih adanya anak yang putus sekolah di Indonesia sehingga KIP penting bagi keberlangsungan pendidikan.
3. Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan sehingga tingginya tingkat anak-anak putus sekolah di Indonesia.
4. Terbatasnya dan kurang optimalnya penyaluran anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah sehingga pemerataan tingkat pendidikan tidak terealisasi dengan baik.
5. Semakin meningkatnya akses dan pelayanan pendidikan, namun tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, di atas maka penelitian ini dibatasi pada evaluasi kebijakan untuk program KIP terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia kepemimpinan Jokowi JK.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan program kebijakan KIP untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Bagaimana efisiensi dari realisasi Program KIP pada Provinsi seIndonesia kepemimpinan Jokowi JK.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Melakukan analisis deskriptif terhadap perkembangan kebijakan program KIP untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Melakukan evaluasi untuk kebijakan program KIP pada Provinsi seindonesia kepemimpinan Jokowi JK.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan dunia di sektor keuangan negara dan pembangunan nasional maupun kalangan masyarakat umum. Manfaat yang dapat diambil diantaranya:

### **1. Manfaat Akademik**

#### **a. Bagi peneliti:**

- (1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- (2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

#### **b. Bagi mahasiswa:**

- (1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- (2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

### **2. Manfaat Non-akademik**

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Pembangunan**

Pembangunan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses perbaikan dari suatu masyarakat yang berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sedangkan secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi dari struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat dari peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di berbagai sektor. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006:28).

Konsep pembangunan merupakan proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu (Todaro dan Smith, 2011:6). Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat

dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income* – GNI) per kapita “riil” sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan – seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro dan Smith, 2011:16).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro dan Smith, 2011:17).

Pengalaman pembangunan dalam dasawarsa 1950-an dan 1960-an, pada saat negara-negara berkembang mencapai target pertumbuhan ekonomi namun tingkat kehidupan sebagian besar masyarakat umumnya tetap tidak berubah, menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dengan pengertian pembangunan yang sempit itu. Kini semakin banyak ekonom dan pembuat kebijakan yang menyuarakan perlunya upaya serius untuk menanggulangi meluasnya kemiskinan absolut, distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, dan meningkatnya pengangguran. Singkatnya, dalam dasawarsa 1970-an, pembangunan ekonomi mulai didefinisi ulang dalam kaitannya dengan upaya pengurangan atau peniadaan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks perekonomian yang semakin berkembang (Todaro dan Smith, 2011:17).

Oleh sebab itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya, pembangunan haruslah mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem itu. Pembangunan seharusnya upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro dan Smith, 2011:18-19)

Terdapat tiga komponen dasar ataupun nilai-nilai inti yang berfungsi sebagai basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami makna pembangunan yang sesungguhnya. Tiga komponen dasar atau nilai-nilai inti pembangunan tersebut ialah (Todaro dan Smith, 2011:25-26):

a. Kecukupan (*sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Semua orang memiliki kebutuhan dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan. Kebutuhan dasar manusia untuk menopang kehidupannya ini mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Jika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau persediaannya tidak memadai, akan terjadi suatu kondisi “keterbelakangan absolut”.

b. Harga diri (*self-esteem*) : Menjadi manusia seutuhnya. Komponen universal kedua bagi adanya kehidupan yang baik adalah harga diri, yaitu suatu perasaan berharga dan bermartabat, tidak diperalat untuk mencapai tujuan orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Denis Goulet, “Pembangunan telah

dilegitimasi sebagai tujuan karena merupakan hal yang penting, bahkan mungkin merupakan cara yang sangat berharga untuk meraih harga diri.”

c. Kebebasan (*freedom*) : kemampuan untuk memilih. Nilai ketiga dan terakhir yang perlu tercakup dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan manusia. Pengertian kebebasan di sini harus dipahami dalam kaitannya dengan kebebasan dari kondisi kekurangan persyaratan hidup yang bersifat material serta kebebasan dari penghambaan sosial terhadap lingkungan, orang lain, penderitaan, lembaga yang represif, dan keyakinan dogmatis, khususnya yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental (*state of mind*) dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses sosial, ekonomi, dan lembaga, memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut (Todaro dan Smith, 2011:27):

- 1) Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok.
- 2) Peningkatan standar hidup.
- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial.

## 2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

### 2.1.2.1 Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono, 1999):

- a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
- b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

- c. Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment*.

*Transfer payment* bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pembelian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya: pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun,

pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis *transfer payment* mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

1) Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesobroto:2001).

2) Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesobroto:2001).

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{PP_kP}{PPK1} < \frac{PkPPn}{PPK2} < \dots < \frac{PkPPn}{PPKn} \dots \dots \dots (2-3)$$

Dimana:

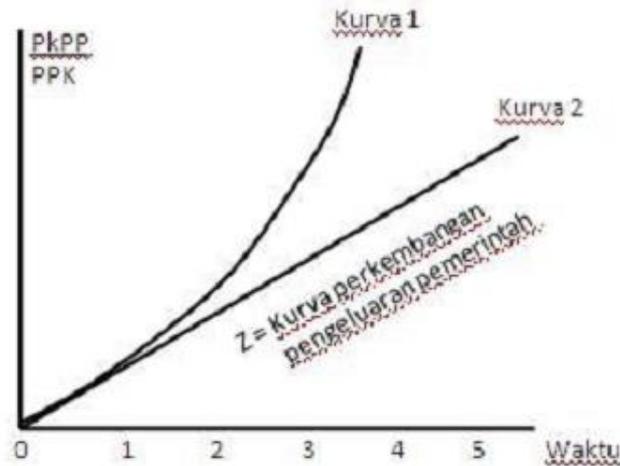
$PP_kP$  = Pengeluaran pemerintah perkapita

$PPK$  = Pendapatan perkapita (GDP/jlh penduduk)

1,2,...,n = jangka waktu (tahun)

**Gambar 2-1**

**Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**



*Sumber: Boediono, 1999*

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut organic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

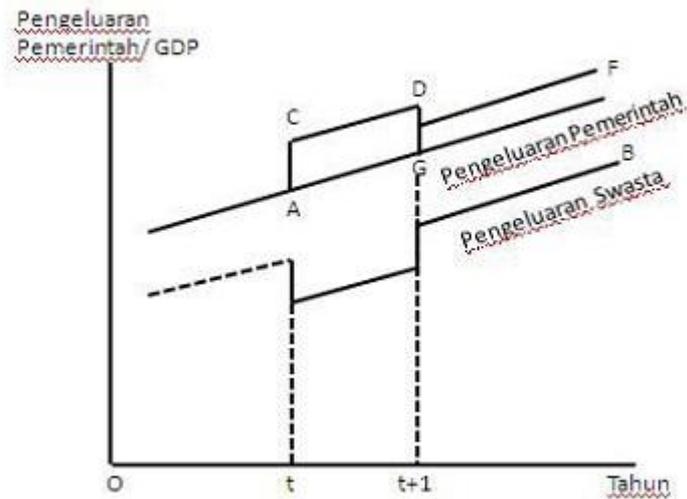
Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai sematamata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir.

Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentration effect). Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang

selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini:

**Gambar 2-2**

**Kurva Peacock dan Wiseman**



*Sumber: Boediono, 1999*

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukkan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukkan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang, pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.

**Gambar 2-3**

**Kurva Wagner, Solow, dan Musgrave**



Sumber: Boediono, 1999

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

4) Teori Batas Kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipotesis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak

yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat.

Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

#### 2.1.2.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain (Mangkoesoebroto:2001).

##### 1) Penentuan Permintaan

$$U^i = f(G, X) \dots\dots\dots(2-4)$$

Dimana:        U        = Fungsi Utilitas  
                  i        = Individu, 1, 2, ..., m  
                  G        = Vektor barang pemerintah  
                  X        = Vektor barang swasta

Seorang individu mempunyai permintaan akan barang publik dan swasta. Akan tetapi, permintaan efektif akan barang tersebut (pemerintah dan swasta) tergantung pada kendala anggaran (budget constraints). Misalkan seorang individu

(i) membutuhkan barang publik (K) sebanyak  $G_k$ . Untuk menghasilkan  $i$  barang K sebanyak  $G_k$ , pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam pelaksanaan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan sama sekali angka kejahatan. Karena itu, pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat. Suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktivitas atau dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

2) Penentuan Tingkat Output

$$U_p = g(X, G, S) \dots\dots\dots(2-5)$$

- Dimana:
- $U_p$  = Fungsi Utilitas
  - $S$  = keuntungan yang diperoleh politisi
  - $G$  = Vektor barang pemerintah
  - $X$  = Vektor barang swasta

Kita asumsikan bahwa fungsi utilitas masyarakat diwakili seorang pemilih:

$$\text{Max } U_i = f(X, G) \dots\dots\dots(2-6)$$

Dengan pemuasan dibatasi kendala anggaran sehingga rumusnya:

$$P_x X + t B < M_i \dots\dots\dots(2-7)$$

- Dimana:
- $P$  = Vektor harga barang swasta
  - $X$  = Vektor barang swasta
  - $B_i$  = Basis pajak individu 1
  - $M_i$  = Total pendapatan individu 1
  - $T$  = Tarif pajak

Kurva permintaan dari pemilik yang mewakili masyarakat ditentukan oleh 2 proses , yaitu dengan mengasumsikan pemilik tidak punya kemampuan mempengaruhi tarif pajak, sehingga dia bertindak sebagai pengambil harga (*Price Taker*) atau, asumsikan kedua pemilik tidak bisa menentukan jumlah barang public, sehingga Ia bertindak sebagai pengambil output (*Output Taker*).

### **2.1.3 Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995).

Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004).

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006).

Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

#### **2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia**

Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosial-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP (*United Nation Development Programme*) yang berjudul *Human Development Report* (laporan Pembangunan Manusia). Inti semua laporan ini, yang dimulai pada tahun 1990, adalah pembuatan dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*). HDI berusaha memeringkat semua negara dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu: 1) masa hidup (*longevity*) yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir.

2) pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dan rasio partisipasi sekolah bruto. 3) standar hidup yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun (*diminishing marginal utility*) pendapatan (Todaro dan Smith, 2011:57).

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia (*Human Development*) sebagai upaya untuk menciptakan/memberikan perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). Konsepsi berpikir ini terbentuk dari pemahaman bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan atau sistem sosial ke arah yang lebih baik, yang dimaknai dengan adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan (*growth*), dan diversifikasi (*diversification*). Perluasan pilihan penduduk yang dimaksud meliputi pilihan untuk berumur panjang dan hidup sehat, berilmu pengetahuan, mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak, memiliki kebebasan untuk berpolitik, serta jaminan perlindungan atas hak asasi manusia dan harga diri. Jadi tujuan utama pembangunan manusia adalah memperbanyak pilihan kepada masyarakat untuk bebas memilih sesuatu hal yang diinginkan dan bagaimana cara untuk menjalani hidup (PGSP, 2012:1).

UNDP juga memperkenalkan suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Pratowo, 2013:16). Indeks Pembangunan Manusia/IPM (*Human Development Index/HDI*) merupakan indeks

yang mengukur pencapaian pembangunan sosial-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro dan Smith, 2011:57).

#### 2.1.4.1 Penggunaan Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan manusia yang dijelaskan dalam PGSP (2012:1) merupakan proses atau kegiatan pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus utama, dan bukan hanya sebagai sasaran akhir dari seluruh kegiatan tercapainya penguasaan atas sumber daya, peningkatan derajat kesehatan, serta meningkatkan pendidikan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Di dalam PGSP (2012:2), dijelaskan mengenai penggunaan konsep pembangunan manusia. Salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai sasaran tersebut, dibutuhkan indikator yang dapat mengkaji kemajuan atau progres pembangunan daerah. Salah satu alternatif untuk mengukur kinerja pembangunan suatu negara atau daerah adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini secara umum menangkap kinerja pembangunan manusia dalam dimensi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Ekonomi

#### 2.1.4.2 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

##### a. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

IPM yang diperkenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*), sejak tahun 1990, digunakan untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen dasar manusia yang secara operasional mudah di hitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia, yaitu (PGSP, 2012:51-53):

##### 1) Peluang Hidup (*Longevity*)

Komponen peluang hidup di ukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

##### 2) Pengetahuan (*Knowledge*)

Komponen pengetahuan di ukur dengan (a) indikator melek huruf, yang diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, (b) indikator rata-rata lama sekolah, yang di hitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/ pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

##### 3) Standar Hidup Layak (*Decent Living*)

Komponen standar hidup layak di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (*adjusted real Gross Domestic Product – GDP per capita*). Perhitungan ini didasarkan pada

*Purchasing Power Parity* – PPP sehingga dapat perbandingan antar negara. Perhitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

$$PPP/unit = \frac{\sum_j \sum(i,j)}{\sum_j P(9,j).q(i,j)} \dots\dots\dots(2-8)$$

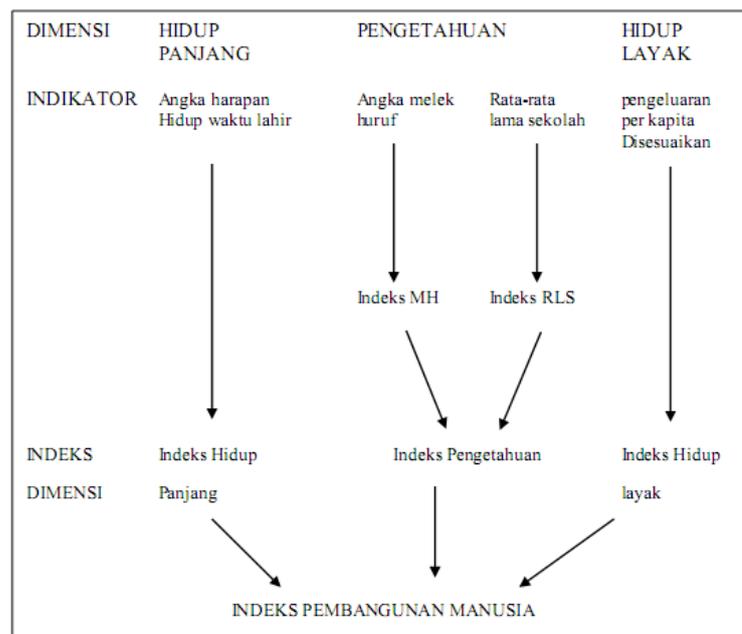
Dengan:  $\sum(i,j)$  : pengeluaran konsumsi untuk barang j di Kabupaten i

$P(9,j)$  : harga barang j di Kabupaten

$q(i,j)$  : jumlah barang j (unit) yang dikonsumsi di Kabupaten i

**Gambar 2-4**

**Pengukuran Pembangunan Manusia**



Sumber: *Pembangunan Provinsi Gorontalo: perencanaan dengan Indeks Pembangunan manusia, Bappenas+pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2010*

b. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia

Di dalam PGSP (2012:3) Indeks Pembangunan Manusia secara umum menangkap kinerja pembangunan manusia dalam dimensi (i) pendidikan; (ii) kesehatan; (iii) ekonomi. Secara khusus indeks ini merupakan agregasi dari Angka

Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf dan lama sekolah, serta tingkat konsumsi per kapita. Sehingga rumus IPM yang dikutip dari Arizal Ahnaf, dkk dalam PGSP (2012:54) dapat disajikan sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots\dots\dots(2-9)$$

Dimana:

$X_1$  = Indeks harapan hidup

$X_2$  = Indeks pendidikan =  $2/3$  (indeks melek huruf) +  $1/3$  (indeks rata-rata lama sekolah)

$X_3$  = Indeks standar hidup layak

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut:

$$\text{Indeks } X(i) = (X_{(i)} - X_{(i) \text{ min}}) / (X_{(i) \text{ maks}} - X_{(i) \text{ min}}) \dots\dots\dots(2-10)$$

Dimana:

$X_{(i)}$  = Indikator ke-i ( $i = 1,2,3,\dots,n$ )

$X_{(i) \text{ min}}$  = Nilai minimum  $X_{(i)}$

$X_{(i) \text{ maks}}$  = Nilai maksimum  $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan minimum indikator  $X_{(i)}$  di sajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2-1**

**Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM (2005)**

<b>Indikator Komponen IPM (<math>X_{(i)}</math>)</b>	<b>Nilai Maksimum</b>	<b>Nilai Minimum</b>	<b>Catatan</b>
AHH	85	25	Sesuai standar Global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar Global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Sesuai standar Global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang d disesuaikan	732.720 <sup>a)</sup>	300.000 <sup>b)</sup>	UNDP menggunakan PDB perkapita riil yang d disesuaikan

*Sumber: PGSP*

Catatan:

- 1) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 telah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5% per tahun selama kurun waktu 1996 – 2018.
- 2) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk provinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di Papua.

Dalam Pratowo (2013:16), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar antara 0 – 100, semakin mendekati 100 maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

- 1)  $IPM \leq 50$  (rendah)
- 2)  $50 \leq IPM \leq 80$  (sedang/menengah)
- 3)  $IPM \geq 80$  (tinggi)

## 2. 2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2-2

### Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian & Nama Peneliti	Model Estimasi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sikap Masyarakat Terhadap Pemanfaatan KIP di Kampung Lebak Manis, Kelurahan Suka Jawa Baru, Kota Bandar Lampung Triana Desita Sari (2017)	Model Analisis : Analisis Interval	SM KIP	Sikap Masyarakat (SM) mendukung pemanfaatan KIP.
2.	Implementasi Kebijakan KIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin Rini Septiani Astuti (2016)	Model Analisis : Analisis Deskriptif	KIP KPS	Sasaran KIP di SMP Negeri 1 Semin adalah siswa yang memiliki KIP sebanyak 161 siswa. Hasil pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pelaksanaan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS, sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya yang terhambat biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata.

Sumber: Penelitian Terdahulu dan diolah

### 2.3 Kerangka Penelitian

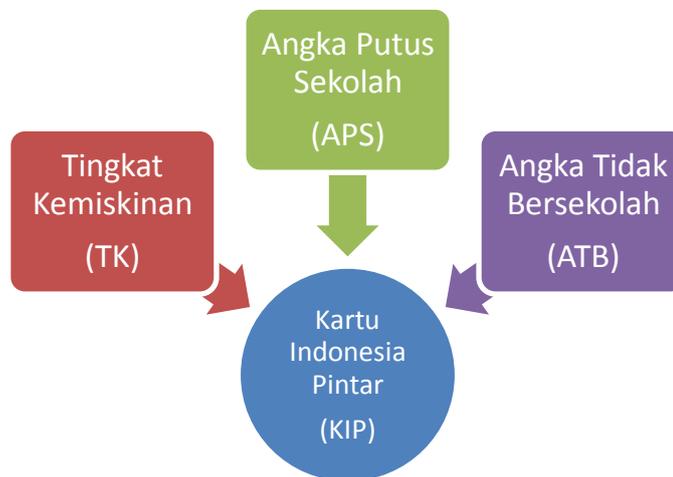
#### Bagan Konseptual Model



Gambar 2-5

#### Bagan Konseptual Model

#### Kerangka Konseptual



Gambar 2-6

#### Kerangka Konseptual

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan model deskriptif-analisis yang berusaha menggambarkan data yang akan diteliti adalah seluruh Provinsi di Indonesia dan waktu penelitian yang dihipotesiskan adalah pada tahun 2016 sampai 2017 yang di publikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun variabel-variabel yang diamati adalah yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian yang bersifat kualitatif dengan model deskriptif-analisis yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena sosial yang diteliti secara mendalam. Tipe penelitian ini dipilih agar peneliti dapat menggambarkan bagaimana terjadinya fenomena yang penulis teliti serta dapat menghubungkan dengan konsep yang dipakai.

#### **3.2 Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan acuan dari landasan teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3-1**  
**Daftar Definisi Operasional**

Variabel	Defenisi Operasional	Sumber
KIP (Kartu Indonesia Pintar)	Jumlah Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar (data dalam juta)	Kementerian Keuangan <a href="http://www.kemenkeu.go.id">www.kemenkeu.go.id</a>
IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Persentase Indeks Pembangunan Manusia (data dalam persen)	Badan Pusat Statistik (BPS) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
TK (Tingkat Kemiskinan)	Persentase Tingkat Kemiskinan di Indonesia (data dalam persen)	Badan Pusat Statistik (BPS) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
TPS (Tingkat Putus Sekolah)	Persentase Tingkat Putus Sekolah di Indonesia (data dalam persen)	Badan Pusat Statistik (BPS) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
ATS (Angka Tidak Sekolah)	Persentase Angka Tidak Sekolah di Indonesia (data dalam persen)	Badan Pusat Statistik (BPS) <a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Medan, Sumatera Utara dengan melihat data-data yang disediakan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu Januari 2018 sampai Maret 2018.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan berdasarkan kurun waktunya, data yang digunakan adalah data *time series* dengan periode waktu tahun 2016 sampai dengan 2017. Sumber data dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari publikasi resmi yang berasal dari: Badan Pusat Statistika, dan data dalam bentuk buku, jurnal ataupun *website* yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka (*Library Reasearch*), dengan cara melakukan pengambilan data dari situs-situs resmi seperti Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) dan situs yang mendukung lainnya dengan runtut waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

### **3.6 Tahapan Analisis**

#### **3.6.1 Teknik Pengolahan Data**

Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penelitian ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui prosedur kualitatif, data-data tersebut dianalisis, ditetapkan, diuraikan, dan didokumentasikan. Hal ini dilakukan agar alur sebab-sebab/konteks-konteks didalam pengetahuan yang sedang dipelajari beserta rincian-rinciannya untuk menilai ide-ide atau makna-makna tertentu yang terkandung didalamnya.

#### **3.6.2 Teknik Analisa Data**

Analisis data secara umum bisa diartikan sebagai proses pengelompokan dan pengimplementasian data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif

adalah identifikasi dan pencarian pola-pola umum hubungan dalam kelompok data yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Tentang Indonesia**

##### **4.1.1 Letak Geografis**

Letak geografis Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang dilihat dari permukaan bumi secara nyata penampakan alam yang membatasi Indonesia. Letak geografis menekan pada fenomena alam berupa keadaan alam yang menlingkupi wilayah tersebut. Hal ini berarti benua, samudera, danau, laut dan sebagainya. Batasan letak geografis Indonesia secara umum diapit oleh dua benua dan dua samudera.

##### 1) Letak Astronomi Indonesia

Selain letak geografis di Indonesia ada letak astronomis dimana posisi Indonesia yang dipengaruhi oleh garis khayal bumi yakni garis lintang dan bujur yang mengelilingi bumi. Di namai garis khayal karena memang pada permukaan bumi sebenarnya, garis ini tidak ada hanya merupakan pengembangan ilmu astronomi. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan bujur, yaitu antara lain:

##### 1. Garis Lintang

Garis lintang membagi struktur bumi menjadi 2 bagian sama besar yaitu antara utara dan selatan. Garis lintang sejajar dengan garis khayal khatulistiwa (equator) yang membentang hingga kutub selatan dan kutub utara. Letak astronomis Indonesia berada pada titik  $6^{\circ}$  lintang utara (LU) sampai  $11^{\circ}$  Lintang Selatan (LS).

## 2. Garis bujur

Garis bujur membelah bumi secara horizontal, dari barat ke timur. Garis bujur disebut juga dengan garis meredian yang membatasi letak astronomis Indonesia antara 95° Bujur Timur (BT) – 141° bujur timur (BT).

## 3. Pengaruh Letak Geografis dan Astronomis Indonesia

Beberapa hal yang mempengaruhi berdasarkan letak geografis :

- a. Mempengaruhi musim – Letak geografis Indonesia dilalui hembusan angin muson (monsoon). Angin muson membawa perbedaan musim yang mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim penghujan dan kemarau yang panas. Angin muson bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali.
- b. Wilayah strategis – Letak Indonesia yang berada diantara 2 benua dan 2 samudera membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan Internasional baik laut dan udara. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi pada zona ekonomu eksklusif Indonesia yang dilewati industri-industri besar.
- c. Mempengaruhi iklim – Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang berarti memiliki iklim tropis. Wilayah negara dengan iklim tropis akan memperoleh sinar matahari sebagai pusat tata surya sepanjang waktu. Hal tersebut akan berbeda dengan yang terjadi pada iklim sub tropis yang memiliki 4 musim, begitu juga dengan daerah beriklim kutub.

- d. Mempengaruhi perbedaan waktu – Letak astronomis mempengaruhi perbedaan waktu yang ditetapkan mulai titik lintang dan bujur 0° Greenwich Inggris. Indonesia sendiri terdiri terbagi menjadi 3 zona waktu yaitu WIB, WIT dan WITA sesuai keputusan Presiden No.41 Tahun 1987.

## **4.2 Analisis Deskriptif Data**

### **4.2.1 Perkembangan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)**

Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang menerima KIP, atau yang berasal dari keluarga miskin dan rentan (misalnya dari keluarga/rumah tangga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) atau anak yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan bagian penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak akhir 2014.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.

Untuk tahap awal di 2014, KIP telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juta anak usia sekolah baik dari keluarga

penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).

KIP juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.

KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu program Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang bertujuan untuk: (1) Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. (2) Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan. (3) Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah. (4) Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

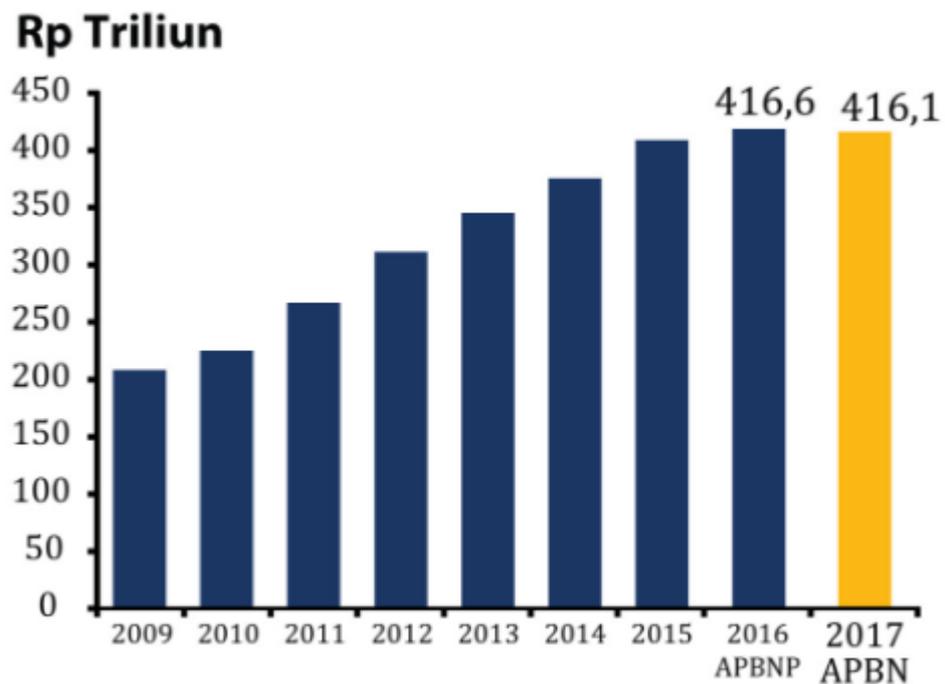
Program BSM (2008-2014) disempurnakan melalui dan menjadi bagian dari Program Indonesia Pintar dan salah satunya merupakan program pemberian

bantuan tunai pendidikan kepada anak yang berhak terutama dari keluarga pemilik Kartu Keluarga Sejahtera/KKS dan kriteria lain yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui penerbitan KIP sebagai penanda/identitas bagi anak.

Untuk mengimplementasikan pasal 31 UUD 1945, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang mengancam anak-anak. Maka dari itu pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.

**Gambar 4-1**

**Anggaran Pendidikan 2009 - 2017**



*Sumber : kemenku.go.id*

Pada tahun 2017 total anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui APBN sebesar Rp416,09 T atau sebesar 20,59% dari total APBN dengan perincian 26,6% (Rp28,73 T) diberikan untuk program kerja kemenristek dikti, 34,7% (Rp50,44 T) diberikan untuk program kerja kementerian agama, sedangkan 27,4% (Rp39,82 T) diberikan untuk program kerja kemendikbud. (Kemenkeu, 2017)

Anggaran pendidikan pada tahun 2017 tetap dijaga 20% dari APBN, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Pada tahun 2014 anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan adalah sekitar Rp370 T, tahun 2015 sekitar Rp410 T, tahun 2016 sebesar Rp416,6 T, dan pada tahun 2017 sebesar Rp416,1 T (Kemenkeu, 2016).

Selain dengan peningkatan postur anggaran pendidikan, pemerintah juga melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat miskin. Salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah melalui PIP adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu bantuan yang diberikan pemerintah berupa bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan bidik misi, rehabilitasi sekolah, dan tunjangan profesi bagi guru.

Untuk Penerima Kartu Indonesia Pintar per tahun 2017 terhitung sebanyak 19,7 juta siswa dimana untuk SD sebesar Rp450 ribu/siswa/tahun, SMP sebesar Rp750 ribu/siswa/tahun, dan untuk SMA/SMK sebesar Rp1 juta/siswa/tahun. Dan Penerima bidik misi sebanyak 362,7 ribu mahasiswa. (Kemenkeu, 2017)

Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak 8,5 juta siswa (Pusat) dimana untuk MI sebesar Rp800 ribu/siswa/tahun dan untuk MTs Rp1

juta/siswa/tahun. Dan sebanyak 46,2 juta siswa (daerah) dimana untuk SD/SDLB sebesar Rp800 ribu/siswa/tahun, SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp1 juta/siswa/tahun, dan SMA/SMK sebesar 1,4 juta/siswa/tahun.

Untuk Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 54.739 ruang (Pusat) dan 27.140 ruang (Daerah). Dan untuk Tunjangan Profesi, sebanyak 1,3 juta guru untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, 41,6 ribu guru untuk Tunjangan Khusus Guru PNSD Daerah Khusus, dan 102,7 ribu dosen untuk Tunjangan Sertifikat Dosen.

Adanya Progam Indonesia Pintar yang diwujudkan dengan pendistribusianKartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan mampu membantu masyarakat yangtidak mampu dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Kebijakan yangdikeluarkan pemerintah tentu akan berjalan baik apabila ada dukungan darimasyarakat. Bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telahdiberikan pemerintah.Begitu juga dengan dikeluarkannya KIP, sikapmasyarakat merupakan faktor yang penting agar dapat terlaksana peningkatanpendidikan pada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ada tigamacam sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan yakni mendukung,netral dan menolak, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengansalah satu warga kampung Lebak Manis Kelurahan sukajawa Baru,kebanyakan masyarakat bersikap kurang mendukung Progam Indonesia Pintarkarena kebanyakan masyarakat menggunakan KIP tidak sebagaimanamestinya, dengan menggunakan KIP bukan untuk membiayai keberlangsunganpendidikan anak, melainkan menggunakannya untuk kepentingan lain sepertiuntuk membayar cicilan motor, membayar iuran listrik dan

sebagainya. Apa yang menjadi tujuan Program Indonesia Pintar, dan apa yang diinginkan pemerintah terhadap pemanfaatan KIP belum termanifestasikan di masyarakat, seharusnya pemanfaatan dana KIP adalah untuk pembelian buku dan alat tulis, pembelian pakaian atau seragam dan perlengkapan sekolah, pembayaran transportasi ke madrasah atau sekolah dan keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran siswa di madrasah atau sekolah seperti biaya untuk membeli media pembelajaran LKS, biaya yang dikeluarkan saat pembelajaran praktik misalnya saat pembelajaran portofolio dan sebagainya.

**Tabel 4-1**

**Perbedaan Antara Program BSM dan KIP**

<b>Program</b>	<b>Pagu Siswa Anak Penerima Manfaat</b>	<b>Cakupan</b>	<b>Penanda</b>
Program BSM	11, 2 juta anak (Tahun 2014)	Siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan formal	KPS yang dimiliki rumah tangga
Program PIP (melalui KIP)	20, 3 juta anak 19,5 juta anak (Tahun 2016)	Anak usia sekolah (6-21 tahun) yang bersekolah di lembaga pendidikan formal dan non formal serta anak tidak sekolah (usia 6-21 tahun) dari	KIP diberikan kepada setiap anak usia sekolah usia 6-21 tahun

		keluarga tidak mampu yang ditetapkan sebelumnya.	
--	--	--	--

*Sumber: TNP2K dan diolah*

#### **4.2.2 Perkembangan Kualitas Pendidikan di Indonesia**

Tingginya biaya pendidikan menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia tahun 2015 penduduk miskin Indonesia berjumlah 28 513.57 ribu jiwa dan tahun 2016 berjumlah 28.005.41 sedangkan di provinsi lampung jumlah penduduk miskin 2015 berjumlah 1.100.68 ribu jiwa naik menjadi 1.169.60 ribu jiwa. Namun bagaimanapun juga, pendidikan tetap harus dinomorsatukan, sebab jika tak adailmu tidak akan kita dapati perbaikan kemiskinan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui peningkatan taraf pendidikan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019). Dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan, pemerintah secara berkelanjutan melakukan pembangunan pendidikan. Pada periode pemerintahan 2015-2019, pembangunan pendidikan berupa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar diantaranya meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah serta meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan. Dalam rangka mewujudkan

sasaran tersebut, pemerintah melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan target yang harus dicapai setiap tahunnya selama 2015-2019. Beberapa capaian pendidikan sudah memenuhi target Kemdikbud. Berdasarkan Susenas tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas dan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk umur 15-59 tahun lebih besar dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Akan tetapi, AMH penduduk umur 15 tahun ke atas masih di bawah target yang diharapkan.

Capaian pendidikan Indonesia secara umum meliputi tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas, dan AMH penduduk kelompok umur muda dan dewasa. Sementara itu, capaian pendidikan yang mencakup penduduk yang masih bersekolah antara lain angka naik kelas/mengulang dan angka melanjutkan. Berikut ini disajikan paparan lebih jelas mengenai ketercapaian indikator pendidikan, anak yang tidak bersekolah, dan angka putus sekolah.

Dapat di lihat dari table berikut ini bahwa banyak terdapat anak – anak yang putus sekolah untuk tingkat SD berdasarkan urutan ranking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Papua sebesar 5,32% urutan ranking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 1,54% urutan ranking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,53% urutan ranking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,16% urutan ranking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,04% . Sedangkan untuk ranking terendah pertama terdapat di Provinsi Aceh sebesar 0,04% urutan ranking terendah kedua terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar

0,06% urutan rangking yang terendah ketiga terdapat di Provinsi Bali sebesar 0,09% urutan rangking yang terendah keempat terdapat di Provinsi Banten sebesar 0,12% urutan rangking yang terendah keempat terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,15% Sedangkan untuk tingkat SMP banyak anak – anak yang putus sekolah berdasarkan urutan rangking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Papua sebesar 4,95% urutan rangking tertinggi yang kedua terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 4,41% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 4,18% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 3,77% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 3,22% . Sedangkan untuk urutan rangking terendah yang pertama terdapat di Provinsi Bali sebesar 0,40% urutan rangking terendah kedua terdapat di Provinsi Maluku sebesar 0,70% urutan rangking terendah ketiga terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,93% urutan rangking terendah keempat terdapat di Provinsi Dki Jakarta sebesar 0,97% urutan rangking terendah kelima terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,05% . Dan untuk tingkat SMA banyak anak – anak yang putus sekolah berdasarkan urutan rangking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,05% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 5,66% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,53% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,78% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Lampung 4,71% , Dan untuk urutan rangking yang terendah pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,69% urutan rangking yang terendah kedua terdapat di Provinsi Bali sebesar 1,20% urutan rangking terendah yang ketiga

terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,23% urutan rangking terendah yang keempat terdapat di Provinsi Banten sebesar 1,35% urutan rangking terendah yang kelima terdapat di Provinsi Maluku sebesar 1,40% .

**Tabel 4-2**

**Angka Putus Sekolah Berdasarkan Level Dan Provinsi Seindonesia Tahun**

**2017 (Persen)**

Provinsi	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SM/Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,04	1,35	1,71
Sumatera Utara	0,14	1,59	2,76
Sumatera Barat	0,42	1,87	2,77
Riau	0,50	1,53	2,07
Jambi	0,42	1,52	3,22
Sumatera Selatan	0,24	1,96	2,85
Bengkulu	0,37	1,21	2,68
Lampung	0,39	1,37	4,71
Kep. Bangka Belitung	0,42	2,29	2,60
Kepulauan Riau	0,37	1,28	2,26
DKI Jakarta	0,29	0,97	1,76
Jawa Barat	0,34	1,83	2,51
Jawa Tengah	0,06	1,85	4,78
DI Yogyakarta	0,15	0,93	0,69
Jawa Timur	0,76	1,30	4,34
Banten	0,12	1,22	1,35
Bali	0,09	0,40	1,20
Nusa Tenggara Barat	1,01	1,05	4,79
Nusa Tenggara Timur	1,04	3,77	4,57
Kalimantan Barat	1,16	3,14	4,25
Kalimantan Tengah	0,79	2,40	4,14
Kalimantan Selatan	0,65	2,93	4,68
Kalimantan Timur	0,18	1,15	1,23
Kalimantan Utara	0,53	2,86	6,05
Sulawesi Utara	0,43	1,71	5,20
Sulawesi Tengah	1,15	1,61	3,11
Sulawesi Selatan	1,53	2,09	4,63
Sulawesi Tenggara	0,66	2,00	5,53
Gorontalo	1,54	4,18	5,66
Sulawesi Barat	1,04	4,41	4,19
Maluku	0,31	0,70	1,40
Maluku Utara	0,20	1,32	4,18
Papua Barat	0,49	3,22	1,71
Papua	5,32	4,95	4,23
<b>Indonesia</b>	<b>0,53</b>	<b>1,76</b>	<b>3,35</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

Tabel 4-3

Angka Tidak Sekolah Menurut Golongan Usia Dan Provinsi SeIndonesia

Di Indonesia Tahun 2017 (Persen)

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,15	1,91	17,85
Sumatera Utara	0,51	3,40	23,24
Sumatera Barat	0,50	3,71	17,14
Riau	1,02	5,27	23,48
Jambi	0,41	4,11	28,46
Sumatera Selatan	0,37	5,99	30,95
Bengkulu	0,20	2,80	20,93
Lampung	0,22	5,24	29,97
Kep, Bangka Belitung	0,36	7,59	33,01
Kepulauan Riau	0,68	0,92	17,20
DKI Jakarta	0,33	2,36	28,50
Jawa Barat	0,49	6,23	33,38
Jawa Tengah	0,38	4,52	31,52
DI Yogyakarta	0,13	0,37	12,39
Jawa Timur	0,43	3,23	28,49
Banten	0,69	4,33	32,23
Bali	0,56	2,28	17,84
Nusa Tenggara Barat	0,57	2,31	23,39
Nusa Tenggara Timur	1,73	5,24	25,35
Kalimantan Barat	1,56	7,49	32,47
Kalimantan Tengah	0,50	6,63	33,38
Kalimantan Selatan	0,45	7,67	31,70
Kalimantan Timur	0,33	1,21	18,68
Kalimantan Utara	1,66	3,96	24,88
Sulawesi Utara	0,63	5,09	26,96
Sulawesi Tengah	1,85	7,59	25,13
Sulawesi Selatan	0,84	6,91	29,40
Sulawesi Tenggara	0,68	5,92	27,06
Gorontalo	1,24	8,77	30,14
Sulawesi Barat	1,90	10,12	31,97
Maluku	0,28	3,14	20,92
Maluku Utara	0,81	2,76	23,94
Papua Barat	2,73	3,08	19,40
Papua	18,20	20,91	36,65
<b>Indonesia</b>	<b>0,86</b>	<b>4,92</b>	<b>28,58</b>

Sumber: BPS, Susenas Maret 2017

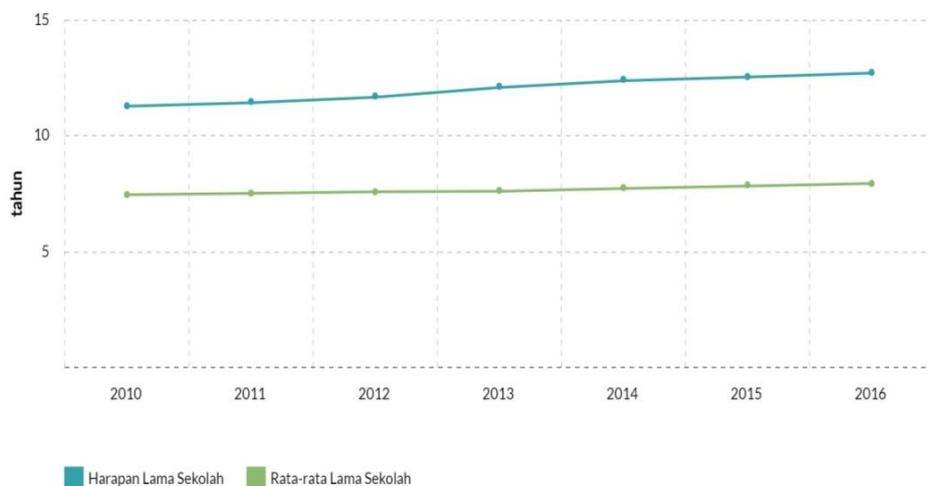
Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa anak perempuan yang tidak bersekolah berdasarkan kelompok umur 7 – 12 tahun (tingkat SD) urutan rangking tertinggi yang pertama banyak terdapat di Provinsi Papua sebesar 18,20% urutan rangking

tertinggi kedua terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 2,73% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,90% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,85% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,73% yang dimana lebih banyak anak perempuan yang tidak bersekolah pada tingkat SD di Papua dibandingkan anak laki – lakinya,dan urutan rangking terendah pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,13% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Aceh sebesar 0,15% urutan rangking terendah ketiga terdapat di Provinsi Bengkulu sebesar 0,20% urutan rangking terendah keempat terdapat di Provinsi Lampung sebesar 0,22% urutan rangking terendah kelima terdapat di Provinsi Maluku sebesar 0,28%,dan kelompok umur 13 – 15 tahun (tingkat SMP ) berdasarkan urutan rangking tertinggi yang pertama terdapat di Provinsi Papua sebesar 20,91% urutan rangking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 10,12% urutan rangking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Gorontalo sebesar 8,77% urutan rangking tertinggi keempat terdapat di provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,59% urutan rangking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,49%,dan urutan rangking terendah yang pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,37% urutan rangking terendah kedua terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,92% urutan rangking terendah ketiga terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,21% urutan rangking terendah keempat terdapat di Provinsi Aceh sebesar 1,91% urutan rangking terendah kelima terdapat di Provinsi Bali sebesar 2,28%, untuk kelompok usia 16 – 18 tahu (tingkat SMA ) banyak anak tidak sekolah berdasarkan urutan rangking tertinggi yang pertama terdapat di

Provinsi Papua sebesar 36,65% urutan ranking tertinggi kedua terdapat di Provinsi Jawa Barat sebesar 33,38% urutan ranking tertinggi ketiga terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 33,38% urutan ranking tertinggi keempat terdapat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 31,97% urutan ranking tertinggi kelima terdapat di Provinsi Jawa Tengah sebesar 31,52%, dan urutan ranking terendah yang pertama terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 12,39% urutan ranking terendah kedua terdapat di Provinsi Sumatera Barat sebesar 17,14% urutan ranking terendah ketiga terdapat di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 17,20% urutan ranking terendah keempat terdapat di Provinsi Bali sebesar 17,84% urutan ranking terendah kelima terdapat di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 18,68%.

**Grafik 4-1**

**Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia tahun 2010-2016**



<b>Tahun</b>	<b>Harapan Lama Sekolah</b>	<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>
2010	11,29	7,46
2011	11,44	7,52
2012	11,68	7,59
2013	12,1	7,61
2014	12,39	7,73
2015	12,55	7,84
2016	12,72	7,95

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Badan Pusat Statistik merilis Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia periode 2010 hingga 2016. Dalam periode tersebut, Harapan Lama Sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1,43 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,49 tahun.

Selama periode 2010-2016, Harapan Lama Sekolah rata-rata tumbuh 2,12 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang sekolah. Tahun 2016, Harapan Lama Sekolah di Indonesia mencapai 12,72 tahun yang berarti anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia tumbuh 1,09 persen per tahun selama periode 2010-2016. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Indonesia yang lebih baik. Pada tahun 2016, secara rata-rata penduduk usia 25

tahun ke atas pendidikannya telah mencapai 7,95 tahun atau hampir menyelesaikan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidak-sesuaian keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja Indonesia. Berikut keterangan distribusi pekerja Indonesia

Terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tenaga kerja Indonesia apabila dilihat dari segi kualitas. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih sangat tergolong rendah, sebanyak 32% dari 2.381.841 jumlah lowongan kerja yang terdaftar ternyata tidak dapat terisi oleh para pencari kerja. Mengapa begitu? Hal ini dipicu oleh rendahnya tingkat pendidikan serta tidak sesuainya keahlian dan ketrampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Sampai dengan Agustus 2011, jumlah tenaga kerja berpendidikan rendah tercatat 54,1 juta orang. Pekerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi baru sebesar 8,8%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sulitnya akses pendidikan menengah dan tinggi karena mahalnya biaya pendidikan.

Tabel dibawah berikut ini memperlihatkan distribusi pekerja berdasarkan tingkat pendidikan formal :

**Tabel 4-4**

**Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia 2000 - 2010**

Pendidikan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Kurang Terdidik	77,7 %	77,8 %	77,7 %	76,8 %	76,3 %	75,8 %	75,6 %	74,9 %	73,5 %	71,1 %	69,4 %
≥ Tamat SD	62,1 %	61,2 %	60,9 %	56,7 %	56,5 %	56,2 %	55,6 %	54,6 %	54,5 %	52,6 %	50,4 %
SLTP	15,6 %	16,6 %	16,7 %	20,1 %	19,8 %	19,5 %	20,0 %	20,3 %	19,0 %	18,5 %	19,1 %
Terdidik	22,3 %	22,2 %	22,3 %	23,2 %	23,7 %	24,2 %	24,4 %	25,1 %	26,5 %	28,9 %	30,6 %
SMU/SMK	17,9 %	17,4 %	17,6 %	18,6 %	18,4 %	18,8 %	18,8 %	19,1 %	20,2 %	21,8 %	22,9 %
Akademi/Dipl.	2,2%	2,2%	2,1%	1,9%	2,2%	2,3%	2,3%	2,5%	2,6%	2,7%	2,8%
Universitas	2,2%	2,6%	2,6%	2,7%	3,0%	3,1%	3,3%	3,6%	3,7%	4,4%	4,8%

Sumber : BPS (Diolah)

Dalam tabel ini, tenaga kerja yang berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau lebih rendah dikelompokkan sebagai angkatan kerja "kurang terdidik", sementara tenaga kerja yang sekurang-kurangnya berhasil menyelesaikan sekolah menengah umum atau kejuruan (SMU/SMK) dikategorikan sebagai angkatan kerja "terdidik" Berdasarkan kategori ini, tampak bahwa proporsi tenaga kerja terdidik terus meningkat dari 22,3% pada tahun 2000 menjadi 30,6% pada tahun 2010. Lebih jauh tabel diatas menunjukkan bahwa kenaikan ini terjadi baik pada mereka yang tamat SMU/SMK maupun tamatan perguruan tinggi (termasuk program diploma).

Sebaliknya, penurunan proporsi tenaga kerja kurang terdidik didorong oleh penurunan proporsi mereka yang hanya tamat sekolah dasar (SD) atau lebih

rendah, sementara proporsi mereka yang hanya tamat SLTP cenderung terus meningkat. Situasi ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dasar dalam bentuk pembebasan biaya untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SLTP).

#### **4.2.3 Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar**

Dalam masa kepemimpinan Jokowi-JK selama 2 tahun berjalan maka realisasi program Kartu Indonesia Pintar sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang dimana ini terwujud dalam meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia di seluruh Provinsi Indonesia, yang membuktikan adanya peningkatan dalam kualitas sumber daya manusianya. Selain itu juga, realisasi program Kartu Indonesia Pintar juga terlihat jelas dari trend kemiskinan di Indonesia yang semakin menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Menurunnya tingkat kemiskinan itu dikarenakan adanya perbaikan dari sumber daya manusianya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan keluar dari garis kemiskinan. Selain itu juga, realisasi program Kartu Indonesia pintar dapat dilihat dari angka anak-anak putus sekolah yang kian lama kian menurun hingga saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya Program Kartu Indonesia Pintar yang dicanangkan oleh Jokowi-Jk sudah terealisasi dengan baik walaupun belum terealisasi secara merata.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka di peroleh kesimpulan bahwa

1. Siswa penerima bantuan KIP di Indonesia berjumlah 19,7 juta siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Siswa yang menerima bantuan KIP telah memenuhi satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan.
2. Kepemilikan KIP mendukung pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial serta penetapannya dengan mencocokkan dengan Dapodik.
3. Mekanisme pelaksanaannya ialah sekolah mengirimkan data ke Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses selanjutnya, yaitu mengundang siswa penerima KIP untuk diberikan informasi mengenai hal terkait. Perlu diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan.
4. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan

sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai Analisis Evaluasi kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat Indonesia, maka peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah seharusnya membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

## 2. Bagi sekolah

- a. Mengenai isu peningkatan mutu, diharapkan sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan intensif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing, sehingga secara tidak langsung kondisi tersebut membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.
- b. Sekolah juga diharapkan dalam memberikan dana KIP tidak hanya siswa saja yang menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan bahwa anak mereka mendapatkan dana KIP. Meskipun sekolah sudah percaya dengan siswa, namun alangkah lebih baik apabila orang tua juga turut diundang.
- c. Sekolah diharapkan dapat mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan selalu menyiapkan *backup* data. Sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta:BPFE
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga Jilid 1*. Jakarta:Erlangga
- Jhingan, M.L. 2000.*Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Daerah*. Jakarta:PT Rajawali Pers.
- Pratowo, Nur Isa. 2013. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia*. Jurnal Study Ekonomi Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah
- Provincial Governance Strengthening Programme.2012. Panduan Penyusunan Laporan pembangunan Manusia Tingkat Provinsi (LPMP). PGSP Project Management Unit:Jakarta Pusat
- <https://safutrarantona.wordpress.com/2016/03/17/sustainable-development-goals-sdgs-quality-education-in-indonesia/>
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta:PT Raja Grafindo Perkasa
- Sukirno (2010), *Ekonomi Mikro Pembangunan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta:Erlangga
- <https://www.kemenkeu.go.id/>
- <https://www.bps.go.id/>

# PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

kepada Yth.  
Ketua Program Studi.....  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Medan.....H

M

Medan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL FADHILAH  
NPM : 1405180057  
Konsentrasi :  
Kelas/Sem : 7B 17  
Alamat : Jl. Amalan, no 32 A

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing : Roswita Hafni disetujui Prodi : (.....)

Berikut hasil survei & kunjungan ke perusahaan/tempat penelitian serta proses pembimbingan dapat

identifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Kemiskinan masih menjadi salah satu faktor penghambat anak untuk menempuh pendidikan di Indonesia karena tingginya biaya pendidikan.
2. Masih adanya anak yang putus sekolah di Indonesia sehingga KIP penting bagi keberlangsungan pendidikan.
3. Kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pendidikan sehingga terdapat tingkat putus sekolah di Indonesia.

Sehingga demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah :

Analisis Evaluasi Efektifitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat Indonesia.

Medan, 28 Desember 2017

Dosen Pembimbing

Dra. Roswita Hafni, Msi

Peneliti/Mahasiswa

( NURUL FADHILAH )

Disetujui Oleh :

Ketua / Sekretaris Prodi

Dr. Roswita Hafni, Msi

Disetujui pada Tanggal : 28 Desember 2017

nomor Agenda : 238

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus diagendakan paling lama 1 (satu) bulan setelah di paraf oleh ketua program studi.
2. Seminar Proposal paling lama 1 (satu) bulan setelah judul diagendakan.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama Lengkap** : NURUL FADHILAH  
**N.P.M** : 1405180057  
**Program Studi** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**Judul Proposal** : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
17/2-2018	Consultan. judul → perbikin abstrak (Judul & abstrak)		
19/2-2018	Amat baik & can formal Atajip KIP, IPM, ATP, APS →		
20/2-2018	Bab I → latar belakang - Identifikasi masalah - Rumus masalah - Alasan masalah (Data 2016 & 2017).		
26/2-2018	Bab II → Landasan Teori - Teori Pendidikan / Kemahiran → kecerdasan - Aktual konsep - Relevansi - Hipotesis.		
27/2-2018	Bab III - Pembahasan		
1/3-2018	ACC Seminar Proposal		

Bimbingan Proposal

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Medan, Februari 2018  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi  
 Ekonomi Pembangunan

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 01 Maret 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

**Nama** : NURUL FADHILAH  
**N.P.M.** : 1405180057  
**Tempat / Tgl.Lahir** : Medan,23 Januari 1996  
**Alamat Rumah** : Amaliun.No.32  
**JudulProposal** :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT  
INDONESIA

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	Analisis Evaluasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan kualitas pendidikan Masyarakat Indonesia
Bab I	.....
Bab II	- Konsep konsep dan hipotesis I → KIP
Bab III	- Model KIP (Quantitas Analisis Dampak)
Lainnya	.....
kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Kamis 01 Maret 2018

**TIM SEMINAR**

**Ketua**

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS., S.E., M.Si.

**Sekretaris**

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

**Pembimbing**

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

**Pemanding**

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE.,M.Si.



## PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan *Ekonomi Pembangunan* yang diselenggarakan pada hari *Kamis* tanggal *01 Maret 2018* menerangkan bahwa:

Nama : NURUL FADHILAH  
N.P.M. : 1405180057  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan,23 Januari 1996  
Alamat Rumah : Amaliun No.32  
JudulProposal :IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT  
INDONESIA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.*

Medan,Kamis 01 Maret 2018

### TIM SEMINAR

Ketua

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS,SE., M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.ROSWITA HAFNI, M.Si.

Pembanding

Dr.PRAWIDYA HARIANI RS, SE.,M.Si.

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan

Wakil Dekan - I 16/03 18

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.

## **SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurul Fadhilah  
NPM : 1405180057  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/ Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 28 Februari 2018  
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Cerdas & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan tanggalnya

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 1913 TGS / II.3 / UMSU-05 / D / 2018**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan **EKONOMI PEMBANGUNAN** Tanggal **01 Maret 2018**, Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : **NURUL FADHILAH**  
N P M : **1405180057**  
Semester : **VIII (Delapan)**  
Jurusan : **EKONOMI PEMBANGUNAN**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN  
MASYARAKAT INDONESIA**

Pembimbing : **Dra.Hj.ROSWITA HAFNI,M.Si.**

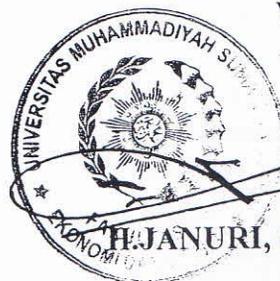
Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **19 Maret 2019**

Ditetapkan di: MEDAN

Pada Tanggal : 02 Rajab 1439 H  
19 Maret 2018 M

Wassalam  
Dekan



**H. JANURI, S.E., MM., M.Si.**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NURUL FADHILAH  
 N.P.M : 1405180057  
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
 Judul Skripsi : ANALISIS EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT INDONESIA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20/2-2018	Acc. proposal seminar - tanfaktian ambil data	J	
1/3-2018	- Data kemiskinan fine fines Data " - 2016 ke Indonesia Data IPM fine fines - " 2016 ke Indonesia - Data Ashar Purus Sekolah Tidak berkolaborasi Akan kendidika → fine fines da ke 2016 ke Indonesia		
27/3-2018	- Bab IV → Analisis Data → MMS (UANasi) → Skripsi → Katahasan fine fines NUSA masalah (kampus)		
	- Perbincangan tentang araha.		
28/3-2018	Acc Skripsi URS sudah mengahya		

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. ROSWILA HAFNI, M.Si

Medan, 28 Maret 2018  
 Diketahui / Disetujui  
 Ketua Program Studi  
 Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS